BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menguraikan hasil penelitian pada Bab IV mengenai hasil penelitian dan pembahasan ini, maka pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai komunikasi politik Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, maka dapat dibuat kesimpulan, sebagai berikut :

1. Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 berawal dari kedekatan para ulama dalam hal ini pengurus FKPP melalui pengajian rutin dwi wulan yang diadakan oleh bupati Kuningan, sehingga terbentuk keputusan politik yang diawali oleh tim "Ting Teng" yang kemudian menjadi Tim Khusus Ulama yang mensosialisasikan keputusan politiknya melalui pengurus-pengurus FKPP di tingkatan Kabupaten, Kecamatan-kecamata, sampai pada desa-desa. Dengan menggunakan tehnik sms yang berisi jargon-jargon politik sebagai cara konsolidasi FKPP.

2. Budaya Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik cenderung tidak demokrasi dan tertutup. Dan terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan. Kemudian budaya yang berkembang dalam pengurus besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam pemilihan Bupati secara langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 muncul budaya "*kumaha ceuk kiai"* (Apa kata kiai), sehingga kesan yang muncul dalam keputusan politik FKPP hanya diikuti saja oleh pengurus-pengurus lainnya tanpa didasari adanya *Learning Politics* atau pembelajaran politik pada semua pengurus FKPP.
3. Faktor-faktor yang mendasari Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 adalah untuk melaksanakan fungsi ulama sebagai control pemerintah dan control masyarakat yang direalisasikan dengan kontrak politik dibangunnya Kuningan Islamic Centre (KIC). Selain itu juga untuk membantah adanya mitos atau kepercayaan masyarakat tentang tidak adanya bupati Kuningan yang menjabat dua periode.
4. Realitas Komunikasi Politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan dalam Pemilihan Bupati Langsung di Kabupaten Kuningan tahun 2009 tidak adanya persamaan makna,

sehingga terkesan adanya perbedaan-perbedaan atau friksi-friksi di FKPP. Terbukti adanya polarisasi sikap politik terhadap figure calon Bupati, polarisasi itu antara lain bahwa pengurus besar FKPP ada yang mendukung Aang Hamid Suganda dan ada sebagian yang mendukung Aan Suharso pada saat pemilihan Bupati Kuningan tahun 2009.

5.2. Saran

5.2.1. Saran Untuk Pengembangan Ilmu

1. Komunikasi adalah kajian yang sangat menarik dan mempunyai banyak aspek untuk terus dijadikan bahan penelitian, sehingga bagi peneliti lainnya yang berminat tentang komunikasi politik,, dapat meneliti bagaimana komunikasi politik yang dilakukan oleh Ormas-ormas lainnya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah langsungm baik di Kabupaten Kuningan ataupun Kabupaten lainnya.
2. Penelitian lain, bisa lebih difokuskan mengenai aspek budaya komunikasi politik dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dalam membangun budaya komunikasi politik sehingga budaya komunikasi politik di dalam internal organisasi maupun eksternal berjalan baik dengan keterbukaan sehingga proses penyampaian pesan politik mampu meminimalisir pemaknaan yang tidak sesuai dengan tujuan komunikasi politik itu sendiri.
3. Bisa dilakukan penelitian yang sama mengenai komunikasi politik organisasi kemasyarakatan yang mempunyai eksistensi dalam ranah

politik, tetapi di lokasi penelitian lain, sehingga ada temuan yang unik mengenai komunikasi politik organisasi kemasyarakatan yang lain.

5.2.2. Saran Untuk Pengembangan Praktis

1. Komunikasi politik merupakan komunikasi yang dapat menjembatani dan memperlancar terjadinya komunikasi antar peserta komunikasi dalam hal ini komunikasi politik Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren baik itu eksternal maupun internal. Artinya, komunikasi politik itu sangat efektif, menjembatani berbagai kepentingan ketika masing-masing peserta secara timbale balik menyampaikan pesan ataupun memberikan respon baik dalam bentuk verbal maupun non verbal.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi Pengurus Besar Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Kuningan untuk bagaimana membgangun komunikasi politik yang baik, baik itu internal maupun eksternal.
3. Untuk mengatasi kegagalan dalam proses komunikasi, maka masing-masing peserta komunikasi politik harus saling memahami bahwa perbedaan yang ada hanya sebatas perbedaan kepentingan dan pemikiran. Untuk itu, intensitas dalam melakukan komunikasi politik diharapkan mampu meminimalisir perbedaan itu.